

**1. INFORMASI INDIKATOR KINERJA
KEPALA PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
LAMPULO**

IKU 1. Jumlah pelaku usaha perikanan yang diperiksa kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan

INFORMASI INDIKATOR KINERJA	URAIAN
1	DEFINISI
	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaku usaha adalah perorangan/ badan yang melakukan usaha di bidang perikanan, meliputi Usaha Pengolahan Ikan, Usaha Penangkapan Ikan dan Usaha Pembudidayaan Ikan • patuh terhadap ketentuan persyaratan perlindungan sumber daya ikan dan lingkungannya adalah kepatuhan pelaku usaha untuk tidak menimbulkan pencemaran perairan yang disebabkan dari usaha bidang perikanan yang dilakukan
2	FORMULA PERHITUNGAN/PENGUKURAN
	$x = \sum a$ <p>x = Jumlah pelaku usaha/pemanfaat pada pemanfaatan pulau-pulau kecil yang patuh a = Pelaku usaha/pemanfaat pada pemanfaatan pulau-pulau kecil yang patuh</p> <p>Parameter kepatuhan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ memiliki dokumen perizinan (AMDAL/UKL-UPL/izin lingkungan); ▪ memiliki IPAL; ▪ kesesuaian IPAL terpasang.
3	SATUAN PENGUKURAN
	Jumlah
4	JENIS ASPEK TARGET PADA SKP
	Kuantitatif
5	VALIDITAS
	<i>Lead proses</i>
6	UNIT/PIHAK PENANGGUNG JAWAB
	Pangkalan PSDKP Lampulo
7	SUMBER DATA
	Kasie Operasional Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran
8	STATUS DATA
	Hasil perhitungan raw data
9	JENIS KONSOLIDASI DATA
	Akumulasi
10	METODE CASCADING
	Adopsi langsung
11	KLASIFIKASI/POLARISASI
	Maximize
12	PERIODE PELAPORAN
	Triwulanan

IKU 2. Jumlah pelaku usaha pemanfaat WP3K yang diperiksa kepatuhannya sesuai peraturan perundangan

INFORMASI INDIKATOR KINERJA	URAIAN
1	<p>DEFINISI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelaku usaha adalah perorangan/ badan yang melakukan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan • pengawasan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan disekitarnya untuk kepentingan pembangunan dibidang ekonomi, sosial, dan budaya dengan berbasis masyarakat dan secara berkelanjutan
2	<p>FORMULA PERHITUNGAN/PENGUKURAN</p> $x = \sum a$ <p>x = Jumlah pelaku usaha/pemanfaat pada pemanfaatan pulau-pulau kecil yang patuh a = Pelaku usaha/pemanfaat pada pemanfaatan pulau-pulau kecil yang patuh</p> <p>Parameter kepatuhan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ memiliki izin lokasi; ▪ memiliki izin pengelolaan; ▪ kesesuaian dan keabsahan izin lokasi; ▪ kesesuaian dan keabsahan izin pengelolaan; ▪ kesesuaian izin lokasi dan izin pengelolaan dengan pelaksanaan kegiatan;
3	<p>SATUAN PENGUKURAN</p> <p>Jumlah</p>
4	<p>JENIS ASPEK TARGET PADA SKP</p> <p>Kuantitatif</p>
5	<p>VALIDITAS</p> <p><i>Lead proses</i></p>
6	<p>UNIT/PIHAK PENANGGUNG JAWAB</p> <p>Pangkalan PSDKP Lampulo</p>
7	<p>SUMBER DATA</p> <p>Kasie Operasional Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran</p>
8	<p>STATUS DATA</p> <p>Hasil perhitungan raw data</p>
9	<p>JENIS KONSOLIDASI DATA</p> <p>Akumulasi</p>
10	<p>METODE CASCADING</p> <p>Adopsi Langsung</p>
11	<p>KLASIFIKASI/POLARISASI</p> <p>Maximize</p>
12	<p>PERIODE PELAPORAN</p> <p>Triwulanan</p>

IKU 3. Jumlah hari operasi kapal pengawas lingkup UPT Pangkalan PSDKP Lampulo

INFORMASI INDIKATOR KINERJA		URAIAN
1	PERSPEKTIF	<i>Internal Process</i>
2	SASARAN STRATEGIS	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan secara profesional dan partisipatif
3	DEFINISI	Jumlah hari operasi kapal pengawas adalah jumlah rata-rata hari operasi kapal pengawas dalam 1 (satu) tahun
4	FORMULA PERHITUNGAN/PENGUKURAN	<p>Untuk memperoleh rata-rata hari operasi diperoleh dari formulasi sebagai berikut:</p> $x = \frac{\sum_{i=1}^n a_i}{n}$ <p>Keterangan : n = Jumlah kapal pengawas yang ada i = indeks kapal pengawas x = Rata-rata hari operasi kapal pengawas a = Jumlah hari operasi seluruh kapal pengawas dalam 1 (satu) tahun</p>
5	SATUAN PENGUKURAN	Jumlah
6	VALIDITAS	<i>Lag Output</i>
7	UNIT/PIHAK PENANGGUNG JAWAB	Pangkalan PSDKP Lampulo
8	SUMBER DATA	Kasie Sarana dan Prasarana
9	JENIS KONSOLIDASI	Akumulasi
10	METODE CASCADING	Komponen Pembentuk
11	KLASIFIKASI	Maximize
12	PERIODE PELAPORAN	Triwulanan

IKU 4. Jumlah Kapal Pengawas yang siap operasi (Unit)

INFORMASI INDIKATOR KINERJA		URAIAN
1	PERSPEKTIF	<i>Internal Process</i>
2	SASARAN STRATEGIS	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan secara profesional dan partisipatif
3	DEFINISI	Jumlah kapal pengawas perikanan sebanyak 34 (tiga puluh empat) unit dalam keadaan siap untuk melakukan kegiatan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
4	FORMULA PERHITUNGAN/PENGUKURAN	<p>Untuk mengukur tingkat capaian jumlah kapal pengawas siap operasi menggunakan formulasi sebagai berikut:</p> $x = \sum_{i=1}^n a_i$ <p>Keterangan: n = Jumlah kapal pengawas yang ada i = indeks kapal pengawas x = Jumlah Kapal Pengawas Siap Operasi a = Kapal Pengawas yang siap operasi</p>
5	SATUAN PENGUKURAN	Jumlah
6	VALIDITAS	<i>Lead Process</i>
7	UNIT/PIHAK PENANGGUNG JAWAB	Pangkalan PSDKP Lampulo
8	SUMBER DATA	Kasie Sarana dan Prasarana
9	JENIS KONSOLIDASI	Akumulasi
10	METODE CASCADING	Komponen Pembentuk
11	KLASIFIKASI	Maximize
12	PERIODE PELAPORAN	Triwulanan

IKU 5. Jumlah hari operasi speedboat/RIB/rubber boat UPT Pangkalan PSDKP Lampulo

INFORMASI INDIKATOR KINERJA		URAIAN
1	PERSPEKTIF	<i>Internal Process</i>
2	SASARAN STRATEGIS	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan secara profesional dan partisipatif
3	DEFINISI	Jumlah hari operasi pesawat patroli adalah jumlah hari pesawat patroli dalam 1 (satu) tahun
4	FORMULA PERHITUNGAN/PENGUKURAN	<p>Untuk mengukur capaian jumlah hari operasi pesawat patroli diperoleh dari akumulasi capaian hari operasi yang telah dilakukan yang diformulasikan sebagai berikut:</p> $x = \sum_{i=1}^n a_i$ <p>Keterangan: n = Total periode operasi pesawat patroli i = Periode operasi pesawat patroli x = Jumlah hari operasi pesawat patroli dalam 1 (satu) tahun a = Jumlah hari operasi pesawat patroli tiap periode operasi</p>
5	SATUAN PENGUKURAN	Jumlah
6	VALIDITAS	<i>Lag Output</i>
7	UNIT/PIHAK PENANGGUNG JAWAB	Pangkalan PSDKP Lampulo
8	SUMBER DATA	Kasie Sarana dan Prasarana
9	JENIS KONSOLIDASI	Akumulasi
10	METODE CASCADING	Komponen Pembentuk
11	KLASIFIKASI	Maximize
12	PERIODE PELAPORAN	Triwulanan

IKU 6. Jumlah penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang disidik secara akuntabel lingkup UPT Pangkalan PSDKP Lampulo

INFORMASI INDIKATOR KINERJA		URAIAN
1	PERSPEKTIF	<i>Internal Process</i>
2	SASARAN STRATEGIS	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan secara profesional dan partisipatif
3	DEFINISI	Penyelesaian tindak pidana perikanan sampai dengan P-21 (berkas perkara dinyatakan lengkap)
4	FORMULA PERHITUNGAN/PENGUKURAN	$X_{tpkp} = \frac{X_{tpk} + X_{tpp}}{2}$ <p> x_{tpkp} = Persentase perkara tindak pidana kelautan dan perikanan yang selesai disidik secara akuntabel (%) x_{tpk} = Persentase perkara tindak pidana kelautan yang selesai disidik secara akuntabel (%) x_{tpp} = Persentase perkara tindak pidana perikanan yang selesai disidik secara akuntabel (%) </p> <p>dimana;</p> $x_{tpk} = \frac{a}{b_{n-1}} \times 100\%$ <p> x_{tpk} = Persentase perkara tindak pidana kelautan yang selesai disidik secara akuntabel (%) a = Jumlah perkara tindak pidana kelautan yang telah selesai ditangani (P-12) b_{n-1} = Jumlah perkara tingkat tindak pidana kelautan yang terjadi s/d 1 bulan sebelum bulan berjalan, yang telah diterbitkan SPDP dan Sprindik (kasus) </p> $x_{tpp} = \frac{a}{b_{n-1}} \times 100\%$

INFORMASI INDIKATOR KINERJA		URAIAN
		x_{tpp} = Persentase perkara tindak pidana perikanan yang selesai disidik secara akuntabel (%) a = Jumlah perkara tindak pidana kelautan yang telah selesai ditangani (P-12) b_{n-1} = Jumlah perkara tingkat tindak pidana kelautan yang terjadi s/d 1 bulan sebelum bulan berjalan, yang telah diterbitkan SPDP dan Sprindik (kasus)
5	SATUAN PENGUKURAN	Persen (%)
6	JENIS ASPEK TARGET PADA SKP	
7	VALIDITAS	<i>Lag Output</i>
8	UNIT/PIHAK PENANGGUNG JAWAB	Pangkalan PSDKP Lampulo
9	SUMBER DATA	Kasie Operasional Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran
10	STATUS DATA	
11	JENIS KONSOLIDASI DATA	Nilai Posisi Akhir
12	METODE CASCADING	Adopsi Langsung
13	KLASIFIKASI/POLARISASI	Maximize
14	PERIODE PELAPORAN	Bulanan

IKU 7. Jumlah Barang Bukti dan Awak kapal yang selesai ditangani secara akuntabel lingkup UPT Pangkalan PSDKP Lampulo

INFORMASI INDIKATOR KINERJA	URAIAN
1	DEFINISI
	<ul style="list-style-type: none"> - Barang bukti yang selesai ditangani adalah barang bukti yang sudah diserahkan ke JPU (Jaksa Penuntut Umum) - Awak kapal yang selesai ditangani adalah awak kapal yang sudah dipulangkan ke negara/daerah asal, atau yang sudah diserahkan ke pihak/instansi terkait
2	FORMULA PERHITUNGAN/PENGUKURAN
	$X_{BBAK} = \frac{X_{BB} + X_{AK}}{2}$ <p>X_{BBAK} = Persentase barang bukti dan awak kapal yang selesai ditangani secara akuntabel (%)</p> <p>X_{BB} = Persentase perkara barang bukti yang selesai ditangani secara akuntabel (%)</p> <p>X_{AK} = Persentase perkara awak kapal yang selesai ditangani secara akuntabel (%)</p> <p>DIMANA :</p> $X_{BB} = \frac{a}{b} \times 100\%$ <p>X_{BB} = Persentase barang bukti yang selesai ditangani secara akuntabel (%)</p> <p>a = Jumlah barang bukti yang selesai ditangani (kasus)</p> <p>b = Jumlah barang bukti tindak pidana perikanan yang terjadi (kasus)</p> <p>DAN</p> $X_{AK} = \frac{a}{b} \times 100\%$ <p>X_{AK} = Persentase awak kapal yang ditangani secara akuntabel (%)</p> <p>a = Jumlah awak kapal yang selesai ditangani (kasus)</p> <p>b = Jumlah awak kapal yang ditangani (kasus)</p>
3	SATUAN PENGUKURAN
	Persen
4	JENIS ASPEK TARGET PADA SKP
	Kualitas/mutu
5	VALIDITAS
	<i>Lag Output</i>
6	UNIT/PIHAK PENANGGUNG JAWAB
	Pangkalan PSDKP Lampulo
7	SUMBER DATA
	Kasie Operasional Pengawasan dan Penanganan Delanggaran
8	STATUS DATA
	Hasil perhitungan raw data

INFORMASI INDIKATOR KINERJA		URAIAN
9	JENIS KONSOLIDASI DATA	Nilai Posisi Akhir
10	METODE CASCADING	Buat baru
11	KLASIFIKASI/POLARISASI	Maximize
12	PERIODE PELAPORAN	Triwulanan

IKU 8. Jumlah Kawasan Konservasi yang diawasi sesuai peraturan perundang-undangan

INFORMASI INDIKATOR KINERJA		URAIAN
1	PERSPEKTIF	<i>Internal Process</i>
2	SASARAN STRATEGIS	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sumber daya kelautan secara profesional dan partisipatif
3	DEFINISI	Jumlah kawasan konservasi perairan yang diawasi ialah akumulasi hasil pengawasan kawasan konservasi perairan baik yang dilakukan oleh UPT PSDKP, Pemerintah Provinsi, atau Pusat. Kawasan konservasi tersebut terdiri dari 10 (sepuluh) kawasan konservasi perairan nasional (KKPN) yang pengelolaannya dilakukan oleh Pusat dan 7 (tujuh) kawasan konservasi perairan daerah (KKPD) yang pengelolaannya dilakukan oleh Provinsi.
4	FORMULA PERHITUNGAN/PENGUKURAN	$X = \sum a$ <p>X = Jumlah kawasan konservasi perairan yang diawasi a = kawasan konservasi perairan yang diawasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>Parameter :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengawasan dilaksanakan terhadap kegiatan pemanfaatan di semua zona kawasan konservasi perairan yang telah ditetapkan peruntukannya (zona inti, zona perikanan berkelanjutan, zona pemanfaatan, zona lainnya) ▪ Pengawasan dilakukan minimal 1 (satu) kali oleh Pengawas Perikanan dan/ atau Polsus PWP3K
5	SATUAN PENGUKURAN	Jumlah
6	JENIS ASPEK TARGET PADA SKP	Kuantitas
7	VALIDITAS	<i>Lag output</i>
8	UNIT/PIHAK PENANGGUNG JAWAB	Pangkalan PSDKP Lampulo
9	SUMBER DATA	Kasie Operasional Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran
10	STATUS DATA	Hasil perhitungan raw data
11	JENIS KONSOLIDASI	Akumulasi
12	METODE CASCADING	Buat Baru
13	KLASIFIKASI	Maximize

INFORMASI INDIKATOR KINERJA		URAIAN
14	PERIODE PELAPORAN	Triwulanan

IKU 9. Jumlah Jenis Ikan yang dilindungi yang diawasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (jenis ikan)

INFORMASI INDIKATOR KINERJA		URAIAN
1	PERSPEKTIF	<i>Internal Process</i>
2	SASARAN STRATEGIS	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sumber daya kelautan secara profesional dan partisipatif
3	DEFINISI	Jumlah jenis ikan dilindungi berdasarkan Peraturan dan/ atau Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan yang diawasi pengelolaannya (perlindungan terbatas atau perlindungan penuh).
4	FORMULA PERHITUNGAN/PENGUKURAN	$X = \sum a$ <p>X = Jumlah jenis ikandilindungi yang diawasi a = jenis ikandilindungi berdasarkan Peraturan dan/ atau Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan yang diawasi</p> <p>Parameter :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan pemanfaatan jenis ikan dilindungi mengikuti ketentuan sebagaimana yang telah ditentukan pada peraturan masing-masing jenis ikan. ▪ Pengawasan dilakukan minimal 1 (satu) kali oleh Pengawas Perikanan di sentra-sentra perikanan (tempat penampungan ikan, pelabuhan perikanan, pasar ikan, pengepul dll).
5	SATUAN PENGUKURAN	Jumlah
6	JENIS ASPEK TARGET PADA SKP	Kuantitas
7	VALIDITAS	<i>Lag output</i>
8	UNIT/PIHAK PENANGGUNG JAWAB	Pangkalan PSDKP Lampulo
9	SUMBER DATA	Kasie Operasional Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran
10	STATUS DATA	Hasil perhitungan raw data
11	JENIS KONSOLIDASI	Akumulasi
12	METODE CASCADING	Buat Baru
13	KLASIFIKASI	Maximize

INFORMASI INDIKATOR KINERJA		URAIAN
14	PERIODE PELAPORAN	Triwulanan

IKU 10. Jumlah pelaku usaha pengelolaan jasa kelautan yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan

INFORMASI INDIKATOR KINERJA	URAIAN
1	DEFINISI
	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaku usaha yang patuh adalah perorangan/badan hukum yang melakukan usaha pengelolaan jasa kelautan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. • Pengelolaan jasa kelautan adalah kegiatan pemanfaatan ruang perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil untuk tujuan komersil atau wisata.
2	FORMULA PERHITUNGAN/PENGUKURAN
	$x = \sum a$ <p>x = Jumlah pelaku usaha Pengelolaan jasa kelautan yang patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku a = Pelaku usaha Pengelolaan jasa kelautan yang patuh</p> <p>Parameter kepatuhan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ memiliki izin lokasi dan izin pengelolaan; ▪ kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan izin lokasi dan izin pengelolaan.
3	SATUAN PENGUKURAN
4	JENIS ASPEK TARGET PADA SKP
5	VALIDITAS
6	UNIT/PIHAK PENANGGUNG JAWAB
7	SUMBER DATA
8	STATUS DATA
9	JENIS KONSOLIDASI DATA
10	METODE CASCADING
11	KLASIFIKASI/POLARISASI
12	PERIODE PELAPORAN

IKU 11. Jumlah Pemenuhan Infrastruktur pengawasan yang memadai secara akuntabel dan tepat waktu (unit)

INFORMASI INDIKATOR KINERJA		URAIAN
1	PERSPEKTIF	<i>Internal Process</i>
2	SASARAN STRATEGIS	Tersedianya infrastruktur pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
3	DEFINISI	Jumlah unit sarana dan prasarana pengawasan yang diadakan sesuai kebutuhan dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dengan alokasi yang tersedia. 1. Sarana: Kapal Pengawas, Speed Boat Pengawas 2. Prasarana: Bangunan Fungsional Pengawas, Bangunan Operator, Tempat Penampungan Sementara ABK Non Yustisia, Gudang, Dermaga Kapal Pengawas dan Bangunan Pendukung Pengawasan
4	FORMULA PERHITUNGAN/PENGUKURAN	Untuk mengukur tingkat capaian Jumlah Pemenuhan Sarana Prasarana Pengawasan yang memadai secara akuntabel dan tepat waktu digunakan formulasi sebagai berikut: $x = \sum a$ Keterangan: x= Jumlah Pemenuhan Sarana Prasarana Pengawasan yang memadai secara akuntabel dan tepat waktu (unit) a= Jumlah Pemenuhan Sarana Prasarana Pengawasan yang memadai secara akuntabel dan tepat waktu (unit).
5	SATUAN PENGUKURAN	Jumlah
6	VALIDITAS	<i>Lag Outcput</i>
7	UNIT/PIHAK PENANGGUNG JAWAB	Pangkalan PSDKP Lampulo
8	SUMBER DATA	Kasie Sarana dan Prasarana
9	JENIS KONSOLIDASI	Nilai Posisi Akhir
10	METODE CASCADING	Buat Baru
11	KLASIFIKASI	Maximize

INFORMASI INDIKATOR KINERJA		URAIAN
12	PERIODE PELAPORAN	Tahunan

IKU 12. Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Pangkalan PSDKP Lampulo

INFORMASI INDIKATOR KINERJA		URAIAN
1	PERSPEKTIF	<i>Learning and Growth</i>
2	SASARAN STRATEGIS	Terwujudnya Aparatur Sipil Negara Dit. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautanyang kompeten, profesional dan berintegritas
3	DEFINISI	<ul style="list-style-type: none"> • Profesionalitas ASN diukur berdasarkan kesesuaian Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin per masing-masing Pegawai AS dalam melaksanakan tugas dan jabatannya • Kualifikasi [Bobot 25%] yaitu yang berkenaan dengan tingkat pendidikan ASN sesuai SK Pangkat terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah di-update pada aplikasi SIMPEG Online KKP dengan penilaian sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pendidikan S3, Nilai 25 ▪ Pendidikan S2, Nilai 20 ▪ Pendidikan S1, Nilai 15 ▪ Pendidikan D3, Nilai 10 ▪ Pendidikan DII/DI/SMA, Nilai 5 ▪ Pendidikan SMP/SD, Nilai 0 • Kompetensi [Bobot 40%] yaitu yang berkenaan dengan keikutsertaan ASN dalam Diklatpim (bagi Pejabat Eselon) serta Diklat Fungsional, Diklat 20 JP, atau Seminar (Bagi ASN Non Eselon), dengan penilaian sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pejabat Struktural dihitung dgn komponen: <ul style="list-style-type: none"> ○ DIKLATPIM: Pernah ikut (Nilai 15), tidak pernah (nilai 0) ○ DIKLAT 20JP: Pernah ikut (Nilai 15), tidak pernah (nilai 0) ○ SEMINAR: Pernah ikut (Nilai 10), tidak pernah (nilai 0) ▪ Pejabat Fungsional Tertentu dihitung dgn komponen: <ul style="list-style-type: none"> ○ DIKLAT Teknis/Fungsional: Pernah ikut (Nilai 15), tidak pernah (nilai 0) ○ DIKLAT 20JP; Pernah ikut (Nilai 15), tidak pernah (nilai 0) ○ SEMINAR. Pernah ikut (Nilai 10), tidak pernah (nilai 0) ▪ Pejabat Fungsional Umum/Staf dihitung dgn komponen: <ul style="list-style-type: none"> ○ DIKLAT 20 JP; Pernah ikut (Nilai 15), tidak pernah (nilai 0) ○ SEMINAR. Pernah ikut (Nilai 10), tidak pernah (nilai 0) • Kinerja (Bobot 30%) yaitu berkenaan dengan hasil penilaian prestasi kerja ASN melalui aplikasi Penilaian Perstasi Kerja Online KKP yang dikolaborasikan dengan database kepegawaian (SIMPEG Online KKP), dengan penilaian sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nilai SKP 91 – Ke atas Nilai : 30 ▪ Nilai SKP 76 – 90 Nilai : 25 ▪ Nilai SKP 61 – 75 Nilai : 15 ▪ Nilai SKP 51 – 60 Nilai : 5 ▪ Nilai SKP 50 ke bawah Nilai : 1 • Disiplin (Bobot 5%) yaitu berkenaan dengan pernah atau tidaknya ASN dijatuhi hukuman disiplin, dengan penilaian sebagai berikut:

INFORMASI INDIKATOR KINERJA	URAIAN
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin Nilai 5 ▪ Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin Ringan Nilai -1 ▪ Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin Sedang Nilai -2 ▪ Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin Berat Nilai -3
4	FORMULA PERHITUNGAN/PENGUKURAN
	<ul style="list-style-type: none"> • ASN Struktural : $(\text{Nilai Kualifikasi}) + (\text{Kompetensi (Diklatpim + Diklat 20 oj + Seminar)}/3) + (\text{Nilai Skp}) + (\text{Nilai Disiplin})$ • ASN Fungsional : $(\text{Nilai Kualifikasi}) + (\text{Kompetensi (Diklat fungsional + Diklat 20 oj + Seminar)}/3) + (\text{Nilai Skp}) + (\text{Nilai Disiplin})$ • ASN Staf : $(\text{Nilai Kualifikasi}) + (\text{Kompetensi (Diklat 20 oj + Seminar)}/3) + (\text{Nilai Skp}) + (\text{Nilai Disiplin})$
5	SATUAN PENGUKURAN Indeks
6	JENIS ASPEK TARGET PADA SKP Kualitas
7	VALIDITAS <i>Lead process</i>
8	UNIT/PIHAK PENANGGUNG JAWAB Pangkalan PSDKP Lampulo
9	SUMBER DATA <ul style="list-style-type: none"> • Aplikasi SIMPEG Online KKP • Aplikasi E-SKP
10	STATUS DATA Hasil perhitungan raw data
11	JENIS KONSOLIDASI DATA Nilai Posisi Akhir
12	METODE CASCADING Lingkup Dipersempit
13	KLASIFIKASI/POLARISASI Maximize
14	PERIODE PELAPORAN Tahunan

IKU 13. Persentase Kehadiran ASN Pangkalan PSDKP Lampulo

	INFORMASI INDIKATOR KINERJA	URAIAN
1	DEFINISI	
	<ul style="list-style-type: none"> • Hari kerja merupakan hari yang ditetapkan untuk pegawai Lingkup Subbagian Tata Usaha dalam bekerja secara formal • Absensi adalah ketidak hadirannya pegawai pada hari dan jam kerja tanpa keterangan yang sah dihitung akumulasi setiap menitnya selama setahun 	
2	FORMULA PERHITUNGAN/PENGUKURAN	
	<p>Persentase kehadiran dihitung dengan formulasi sebagai berikut:</p> $x = \left(\frac{\sum h X \sum p}{(\sum h X \sum p) - (\sum a + \sum tl + \sum psw)} \right) \times 100\%$ <p><i>x</i> : Persentase Kehadiran ASN</p> <p>$\sum h$: Jumlah waktu kerja selama kurun waktu pelaporan permenit</p> <p>$\sum p$: Jumlah pegawai</p> <p>$\sum a$: Jumlah Alfa (480 menit perhari) selama kurun waktu pelaporan setiap pegawai</p> <p>$\sum tl$: Jumlah terlambat permenit selama kurun waktu pelaporan setiap pegawai</p> <p>$\sum psw$: Jumlah pulang sebelum waktu permenit selama kurun waktu pelaporan setiap pegawai</p>	
3	SATUAN PENGUKURAN	Persen (%)
4	JENIS ASPEK TARGET PADA SKP	Kuantitatif
5	VALIDITAS	<i>Lead proses</i>
6	UNIT/PIHAK PENANGGUNG JAWAB	Subbagian Tata Usaha Pangkalan PSDKP Lampulo
7	SUMBER DATA	Daftar hadir pegawai (aplikasi e-pegawai)
8	STATUS DATA	Hasil perhitungan raw data
9	JENIS KONSOLIDASI DATA	Rata-rata
10	METODE CASCADING	Buat Baru

	INFORMASI INDIKATOR KINERJA	URAIAN
11	KLASIFIKASI/POLARISASI	Maximize
12	PERIODE PELAPORAN	Triwulanan

IKU 14. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup UPT Pangkalan PSDKP Lampulo (%)

INFORMASI INDIKATOR KINERJA		URAIAN
1	PERSPEKTIF	<i>Learn and Growth</i>
2	SASARAN STRATEGIS	Tersedianya manajemen pengetahuan Subbagian Tata Usaha yang handal dan mudah diakses
3	DEFINISI	<ul style="list-style-type: none"> Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Perhitungan penerapan Manajemen Pengetahuan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo dilakukan atas (i) tingkat <i>sharing</i> dokumen mandatory; (ii) tingkat keikutsertakan pejabat dan staf serta (iii) tingkat keaktifan unit kerja dalam SI-MP.
4	FORMULA PERHITUNGAN/PENGUKURAN	<ul style="list-style-type: none"> Capaian IKU Manajemen Pengetahuan di Level 0 dihitung dari rata-rata nilai Manajemen Pengetahuan Unit Kerja Eselon I lingkup KKP, sebagaimana rumus berikut : $MP_0 = \frac{MP_1 + MP_2 + \dots + MP_n}{n}$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> MP₀ = persentase manajemen pengetahuan KKP MP₁, MP₂, ...MP_n = persentase manajemen pengetahuan Unit Kerja Eselon I n = Jumlah unit kerja eselon I
5	SATUAN PENGUKURAN	Persen (%)
6	JENIS ASPEK TARGET PADA SKP	Kuantitas
7	VALIDITAS	<i>Lag Output</i>
8	UNIT/PIHAK PENANGGUNG JAWAB	Subbagian Tata Usaha Pangkalan PSDKP Lampulo
9	SUMBER DATA	www.sip.kkp.go.id dan https://kkp.go.id/djpsdkp
10	STATUS DATA	Hasil perhitungan raw data
11	JENIS KONSOLIDASI DATA	Nilai Posisi Akhir
12	METODE CASCADING	Buat Baru
13	KLASIFIKASI/POLARISASI	Maximize
14	PERIODE PELAPORAN	Triwulanan

IKU 15. Persentase Penyerapan Anggaran Pangkalan PSDKP Lampulo

	INFORMASI INDIKATOR KINERJA	URAIAN
1	DEFINISI	
	<ul style="list-style-type: none"> • Indikator penyerapan anggaran digunakan untuk menilai kualitas penyerapan anggaran berdasarkan target penyerapan pada tiap triwulan. Penilaian dihitung berdasarkan persentase capaian realisasi dibandingkan dengan target penyerapan anggaran pemerintah • Kinerja penyerapan anggaran diharapkan tidak hanya berfokus pada capaian realisasi anggarannya, melainkan juga capaian output setiap K/L, dan dilakukan secara efisien dan efektif • Penyerapan anggaran yang dapat mencapai target, maka nilainya semakin baik 	
2	FORMULA PERHITUNGAN/PENGUKURAN	
	Penyerapan Anggaran (Penyerapan anggaran yang dapat mencapai target , maka nilainya semakin baik) $\% \text{ Penyerapan Anggaran} = \left(\frac{\sum \text{Realisasi Anggaran}}{\sum \text{Pagu}} \right) \times 100$	
3	SATUAN PENGUKURAN	Persen (%)
4	JENIS ASPEK TARGET PADA SKP	Kualitas
5	VALIDITAS	<i>Lag Output</i>
6	UNIT/PIHAK PENANGGUNG JAWAB	Subbag TU Pangkalan PSDKP Lampulo
7	SUMBER DATA	Aplikasi OM-SPAN Kementerian Keuangan
8	STATUS DATA	Hasil perhitungan raw data
9	JENIS KONSOLIDASI DATA	Nilai Posisi Akhir
10	METODE CASCADING	Komponen Pembentuk
11	KLASIFIKASI/POLARISASI	Maximize

IKU 16. Persentase pemenuhan dokumen RB lingkup UPT Pangkalan PSDKP Lampulo (%)

INFORMASI INDIKATOR KINERJA	URAIAN
1	DEFINISI
	<p>Presentase pemenuhan dokumen RB sesuai dengan karakteristik unit kerja masing-masing mencakup Area :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen Perubahan 2. Penataan Peraturan Perundang-undangan 3. Penataan dan Penguatan Organisasi 4. Penataan Tata Laksana 5. Penataan Sistem Manajemen SDM 6. Penguatan Akuntabilitas 7. Penguatan Pengawasan 8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
2	FORMULA PERHITUNGAN/PENGUKURAN
	$\frac{\sum N_t}{\sum N} \times 100 \%$ <p>Dimana,</p> <ul style="list-style-type: none"> • $\sum N_t$: Jumlah dokumen pemenuhan RB dari masing-masing unit kerja berdasarkan karatekteristik • $\sum N$: Jumlah dokumen pemenuhan RB yang diberikan dari unit Eselon I berdasarkan rencana aksi
3	SATUAN PENGUKURAN
4	JENIS ASPEK TARGET PADA SKP
5	VALIDITAS
6	UNIT PENANGGUNG JAWAB
7	SUMBER DATA
8	STATUS DATA
9	JENIS KONSOLIDASI DATA
10	METODE CASCADING
11	KLASIFIKASI/POLARISASI
12	PERIODE PELAPORAN

IKU 17. Level Maturitas SPIP lingkup lingkup UPT Pangkalan PSDKP Lampulo

INFORMASI INDIKATOR KINERJA		URAIAN																												
1	PERSPEKTIF	<i>Learning and Growth</i>																												
2	SASARAN STRATEGIS	Terwujudnya birokrasi Pangkalan PSDKP Lampulo yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima																												
3	DEFINISI	<p>Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern di lingkungan Pangkalan PSDKP Lampulo .</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>LEVEL</th> <th>TINGKAT MATURITAS</th> <th>INTERVAL SKOR</th> <th>KETERANGAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>Belum Ada (Dalam Penataan)</td> <td>0 < skor < 1,0</td> <td>Belum memiliki kebijakan dan prosedur</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Rintisan</td> <td>1,0 ≤ skor < 2,0</td> <td>Ada praktik pengendalian intern – ada kebijakan dan prosedur tertulis, namun masih bersifat ad-hoc dan tidak terorganisasi dengan baik. Tanpa komunikasi dan pemantauan</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Berkembang</td> <td>2,0 ≤ skor < 3,0</td> <td>Ada praktik pengendalian intern tapi tidak terdokumentasi dengan baik. Pelaksanaan tergantung pada individu dan belum melibatkan semua unit organisasi. Efektivitas pengendalian belum dievaluasi</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Terdefinisi</td> <td>3,0 ≤ skor < 4,0</td> <td>Ada praktik pengendalian intern yg terdokumentasi dengan baik. Evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai.</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Terkelola dan Terukur</td> <td>4,0 ≤ skor < 4,5</td> <td>Ada praktik pengendalian internal yang efektif. Evaluasi formal dan terdokumentasi.</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Optimum</td> <td>4,5 ≤ skor ≤ 5</td> <td>Menerapkan pengendalian intern yang berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan. Pemantauan otomatis menggunakan aplikasi komputer</td> </tr> </tbody> </table>	LEVEL	TINGKAT MATURITAS	INTERVAL SKOR	KETERANGAN	0	Belum Ada (Dalam Penataan)	0 < skor < 1,0	Belum memiliki kebijakan dan prosedur	1	Rintisan	1,0 ≤ skor < 2,0	Ada praktik pengendalian intern – ada kebijakan dan prosedur tertulis, namun masih bersifat ad-hoc dan tidak terorganisasi dengan baik. Tanpa komunikasi dan pemantauan	2	Berkembang	2,0 ≤ skor < 3,0	Ada praktik pengendalian intern tapi tidak terdokumentasi dengan baik. Pelaksanaan tergantung pada individu dan belum melibatkan semua unit organisasi. Efektivitas pengendalian belum dievaluasi	3	Terdefinisi	3,0 ≤ skor < 4,0	Ada praktik pengendalian intern yg terdokumentasi dengan baik. Evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai.	4	Terkelola dan Terukur	4,0 ≤ skor < 4,5	Ada praktik pengendalian internal yang efektif. Evaluasi formal dan terdokumentasi.	5	Optimum	4,5 ≤ skor ≤ 5	Menerapkan pengendalian intern yang berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan. Pemantauan otomatis menggunakan aplikasi komputer
LEVEL	TINGKAT MATURITAS	INTERVAL SKOR	KETERANGAN																											
0	Belum Ada (Dalam Penataan)	0 < skor < 1,0	Belum memiliki kebijakan dan prosedur																											
1	Rintisan	1,0 ≤ skor < 2,0	Ada praktik pengendalian intern – ada kebijakan dan prosedur tertulis, namun masih bersifat ad-hoc dan tidak terorganisasi dengan baik. Tanpa komunikasi dan pemantauan																											
2	Berkembang	2,0 ≤ skor < 3,0	Ada praktik pengendalian intern tapi tidak terdokumentasi dengan baik. Pelaksanaan tergantung pada individu dan belum melibatkan semua unit organisasi. Efektivitas pengendalian belum dievaluasi																											
3	Terdefinisi	3,0 ≤ skor < 4,0	Ada praktik pengendalian intern yg terdokumentasi dengan baik. Evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai.																											
4	Terkelola dan Terukur	4,0 ≤ skor < 4,5	Ada praktik pengendalian internal yang efektif. Evaluasi formal dan terdokumentasi.																											
5	Optimum	4,5 ≤ skor ≤ 5	Menerapkan pengendalian intern yang berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan. Pemantauan otomatis menggunakan aplikasi komputer																											
4	FORMULA PERHITUNGAN/PENGUKURAN	<p>Berdasarkan hasil evaluasi tingkat maturitas SPIP oleh BPKP pada Eselon I Tahun 2017 dengan mengadopsi langsung dari hasil evaluasi oleh BPKP.</p> <p>Dalam hal BPKP tidak melakukan evaluasi tingkat maturitas SPIP pada tingkatan Eselon I, maka data capaian dapat diambil dari hasil pengukuran mandiri tim internal KKP (Inspektorat Jenderal KKP) dengan menggunakan pedoman dari BPKP.</p>																												
5	SATUAN PENGUKURAN	Nilai (level)																												
6	JENIS ASPEK TARGET PADA SKP																													

INFORMASI INDIKATOR KINERJA		URAIAN
7	VALIDITAS	<i>Lead process/Lag Output</i>
8	UNIT/PIHAK PENANGGUNG JAWAB	Pangkalan PSDKP Lampulo
9	SUMBER DATA	BPKP dan Inspektorat Jenderal
10	STATUS DATA	
11	JENIS KONSOLIDASI DATA	Nilai Posisi Akhir
12	METODE CASCADING	Lingkup Dipersempit
13	KLASIFIKASI/POLARISASI	Maximize
14	PERIODE PELAPORAN	Triwulanan

IKU 18. Persentase pemenuhan dokumen AKIP lingkup UPT Pangkalan PSDKP Lampulo (%)

INFORMASI INDIKATOR KINERJA		URAIAN
1	SASARAN STRATEGIS	Terwujudnya Birokrasi Pangkalan PSDKP Lampulo yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima
2	DEFINISI	SAKIP adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.
3	FORMULA PERHITUNGAN/PENGUKURAN	$SAKIP = \frac{\sum Nt}{\sum N} \times 100\%$ <p>Dimana, SAKIP : Persentase Pemenuhan Dokumen AKIP Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo $\sum Nt$: Jumlah dokumen pemenuhan AKIP dari masing – masing unit kerja $\sum N$: Jumlah dokumen pemenuhan AKIP yang disampaikan ke Sekretaris Ditjen PSDKP</p>
4	SATUAN PENGUKURAN	Persen (%)
5	JENIS ASPEK TARGET PADA SKP	Kuantitas
6	VALIDITAS	<i>Lead Process</i>
7	UNIT/PIHAK PENANGGUNG JAWAB	Kepala Pangkalan PSDKP Lampulo
8	SUMBER DATA	Urusan Tata Usaha
9	STATUS DATA	Hasil perhitungan raw data
10	JENIS KONSOLIDASI DATA	Rata-rata
11	METODE CASCADING	Buat Baru
12	KLASIFIKASI/POLARISASI	Maximize
13	PERIODE PELAPORAN	Triwulanan

IKU 19. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran lingkup UPT Pangkalan PSDKP Lampulo

	INFORMASI INDIKATOR KINERJA	URAIAN
1	PERSPEKTIF	<i>Learning and Growth</i>
2	SASARAN STRATEGIS	Terkelolanya anggaran Dit. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan secara efisien dan akuntabel
3	DEFINISI	<p>Nilai kinerja pelaksanaan anggaran adalah proses evaluasi dan <i>spending review</i> terhadap optimalisasi peran belanja Kementerian/Lembaga dalam rangka ketahanan fiskal dan ekonomi dengan berdasarkan 12 (dua belas) Indikator Pelaksanaan Anggaran yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Revisi DIPA (Semakin rendah angka persentase revisi DIPA yang diperoleh, maka semakin baik kinerja perencanaan anggaran pada K/L tersebut) $IK1 = \left(\frac{\sum Target Revisi DIPA}{\sum Revisi DIPA} \right)$ 2. Deviasi RPD (Semakin rendah persentase deviasi (<i>angka absolut</i>) yang diperoleh, maka semakin baik kualitas rencana penarikan halaman III DIPA dan kinerja realisasi anggaran K/L) $IK2 = \left(\frac{Realisasi Penarikan dana - Perencanaan Hal III DIPA}{Perencanaan Hal III DIPA} \right)$ 3. Pengelolaan UP (Semakin tinggi % ketepatan waktu, maka semakin baik kinerja pengelolaan UP) $IK3 = \left(\frac{\sum SPM GUP yang disampaikan tepat waktu}{\sum SPM GUP} \right) \times 100$ 4. LPj Bendahara (Semakin tinggi % ketepatan waktu, maka semakin baik kinerja penyampaian LPj Bendahara) $IK4 = \left(\frac{\sum Data LPj Bendahara yang disampaikan tepat waktu}{\sum LPj Bendahara yang disampaikan ke KPPN} \right) \times 100$ 5. Data Kontrak (Semakin tinggi % ketepatan waktu, maka semakin baik kinerja penyampaian data kontrak) $IK5 = \left(\frac{\sum Data kontrak yang disampaikan tepat waktu}{\sum Data kontrak yang disampaikan ke KPPN} \right) \times 100$ 6. Penyelesaian Tagihan (Semakin tinggi % ketepatan waktu, maka semakin baik kinerja penyelesaian tagihannya) $IK6 = \left(\frac{\sum Tagihan yang disampaikan tepat waktu}{\sum Total Tagihan} \right) \times 100$ 7. Penyerapan Anggaran (Penyerapan anggaran yang dapat mencapai target, maka

INFORMASI INDIKATOR KINERJA	URAIAN
	<p>nilainya semakin baik)</p> $IK7 = \left(\frac{\sum \text{Realisasi Anggaran}}{\sum \text{Pagu}} \right) \times 100$ <p>8. Retur SP2D (Semakin rendah persentase retur SP2D yang diperoleh, maka semakin baik kualitas SPM yang diajukan ke KPPN)</p> $IK8 = \left(\frac{\sum \text{Retur SP2D}}{\sum \text{SP2D Terbit}} \right) \times 100$ <p>9. Perencanaan Kas (Semakin tinggi % ketepatan waktu, maka semakin baik kinerja kesesuaian pengajuan SPM dengan Renkas/RPD harian)</p> $IK9 = \left(\frac{\sum \text{Data Renkas yang disampaikan tepat waktu}}{\sum \text{Renkas yang disampaikan ke KPPN}} \right) \times 100$ <p>10. Pengembalian SPM (Semakin rendah % kesalahan, maka semakin baik kualitas SPM yang disampaikan ke KPPN)</p> $IK10 = \left(\frac{\sum \text{SPM salah}}{\sum \text{LPj Bendahara yang disampaikan ke KPPN}} \right) \times 100$ <p>11. Dispensasi SPM (Semakin rendah % pengajuan dispensasi SPM, maka semakin baik kinerja indikator dispensasi pengajuan SPM)</p> $IK11 = \left(\frac{\sum \text{Dispensasi SPM}}{\sum \text{Total SPM yang disampaikan ke KPPN}} \right) \times 100$ <p>12. Pagu Minus (Semakin rendah angka persentase pagu minus yang diperoleh, maka semakin baik kinerja perencanaan anggaran Belanja Pegawai pada K/L tersebut)</p> $IK12 = \left(\frac{\sum \text{Pagu Minus}}{\sum \text{Pagu}} \right) \times 100$
4	FORMULA PERHITUNGAN/PENGUKURAN
	<p>$IKPA = IK1 + IK2 + IK3 + \dots + IK12$</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perhitungan manual IKU pada triwulan I sampai dengan Triwulan 3 untuk 10 indikator (Dispensasi SPM dan Pagu Minus tidak termasuk) • Perhitungan manual IKU pada triwulan IV untuk 12 indikator
5	SATUAN PENGUKURAN
6	JENIS ASPEK TARGET PADA SKP
7	VALIDITAS
8	UNIT/PIHAK PENANGGUNG JAWAB
9	SUMBER DATA

INFORMASI INDIKATOR KINERJA		URAIAN
10	STATUS DATA	Hasil Perhitungan Rawa Data
11	JENIS KONSOLIDASI DATA	Nilai Posisi Akhir
12	METODE CASCADING	Lingkup Dipersempit
13	KLASIFIKASI/POLARISASI	Maximize
14	PERIODE PELAPORAN	Triwulanan

IKU 20. Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK UPT Pangkalan PSDKP Lampulo dibandingkan realisasi anggaran UPT Pangkalan PSDKP Lampulo TA. 2018 (%)

INFORMASI INDIKATOR KINERJA		URAIAN
1	PERSPEKTIF	<i>Learning and Growth</i>
2	SASARAN STRATEGIS	Terkelolanya anggaran Dit. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan secara efisien dan akuntabel
3	DEFINISI	<p>Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Atas LK Dit. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (<i>adequate disclosures</i>), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.</p>
4	FORMULA PERHITUNGAN/PENGUKURAN	$\frac{\sum NT}{\sum R} \times 100 \%$ <p>Dimana, $\sum NT$: Jumlah Nilai Temuan Atas Laporan Keuangan T.A. 2018 $\sum R$: Jumlah Realisasi Anggaran T.A. 2018</p> <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Batas tertinggi jumlah nilai temuan atas laporan keuangan T.A. 2018 (<i>audited</i>) yang belum ditindaklanjuti tidak melebihi 1 %
5	SATUAN PENGUKURAN	Persen (%)
6	JENIS ASPEK TARGET PADA SKP	Kualitas
7	VALIDITAS	<i>Lead Process</i>
8	UNIT/PIHAK PENANGGUNG JAWAB	Pangkalan PSDKP Lampulo
9	SUMBER DATA	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI
10	STATUS DATA	Hasil Perhitungan Rawa Data
11	JENIS KONSOLIDASI DATA	Nilai Posisi Akhir
12	METODE CASCADING	Lingkup Dipersempit

INFORMASI INDIKATOR KINERJA		URAIAN
13	KLASIFIKASI/POLARISASI	Minimize
14	PERIODE PELAPORAN	Tahunan